**SINERGITAS SDM APARATUR DESA DALAM MENYAHUTI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DESA AEK BAYUR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Oleh:**

**Rahmat, MM**

*Dosen Fakultas Ekonomi UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dengan Kepala Desa sering terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya dapat memicu terjadinya konflik, yaitu adanya sikap perilaku khusus Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kominukasi dan koordinasi, dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat.***

***Sehingga muncul pertanyaan, Bagaimana Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Sinergitas SDM Aparatur Desa adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen ataukekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual.Pelayanan publik atau pelayanan umum/masyarakat dapat diartikan sebagai segala bentuk atau segala jenis pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk jasa maupun barang yang bersifat publik.***

***Penelitian ini relevan dengan milik Kukuh Kurniawan Aji. Kerangka berfikir penelitian ini berasal dari Sinergitas SDM Aparatur Desa terhadap Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:Observasi, Wawancara, Dokumentasi.Hasil penelitian ini adalah Sebenarnya hubungan Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat sudah sangat baik, tetapi BPD yang tebentuk di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan masih kurang memahami tugas dan fungsi BPD termasuk dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa, sehingga mereka perlu mengikuti sosialisai yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD tersebut.***

***Sehingga pembahasannya untuk mengukur Sinergitas ini berjalan dengan efektif atau tidak, terdapat beberapa indikator di antaranya:Koordinasi, Komunikasi, Sinkronisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa harus harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dami kelangsungan pemerintah desa dan pelayanan desa.***

***Kata Kunci: Sinergitas SDM Aparatur Desa, Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat***

***Desa***

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai aset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) yang termasuk sebagai aparatur desa.

Selain itu, pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat harus benar-benar memperhatikan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan di tampung oleh BPD tidak akan mampu di salurkan jika tidak terdapat kerjasama antar BPD dan pemerintah yang harmonis. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Jika dilihat dari tugas pokoknya, kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa untuk kemudian disalurkan ke pemerintah desa dan juga masih terlihat jarak antara pemerintah desa dengan BPD terutama Kepala Desa.

Masyarakat masih mengeluhkan kinerja dari BPD terutama dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di desa, BPD di desa tersebut hanya sebatas organisasi semata yang anggotannya hanya menerima gaji namun tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa selaku mitra kerja, yang seharusnya bekerjasama dalam melaksanakan proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatandan belanja desa (APBD) serta pelaksanaan pertanggungjawaban desa.

Hubungan kerjasama antara BPD denga Kepala Desa menunjukan adanya saling ketergantungan dalam proses tersebut, dengan melihat kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dengan Kepala Desa sering terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya dapat memicu terjadinya konflik, yaitu adanya sikap perilaku khusus Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kominukasi dan koordinasi, dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat.

Selain itu kurangnya pengetahuan dari anggota BPD dalam hal undang-undang yang mengatur tentang tugas dan pokok dari anggota BPD itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan perencanaan pembangunan desa, oleh karena itu judul penelitian yang digunakan adalah “Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan”.

* 1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitianini, yaitu :

1. Bagaimana Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dari Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan?
	1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi, komunikasi, dan Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

**II KAJIAN TEORI**

* 1. **Landasan Teori**

**2.1.1 Sinergitas SDM Aparatur Desa**

Menurut Deardorff dan Williams (2016) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen ataukekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian, terdapat 2 suatu sinergi apabila hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan menghasilkan persamaan matematik sebagai berikut: 1 + 1 = 2.

Pengertian desa menurut Leo Agustino (2018) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kedua kalimat di atas dapat kita artikan yaitu, Pemerintahan Desa atau SDM Aparatur Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari pengertian di atas kita simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun) Badan Permusayawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka Pemerintahan Desa = Pemerintah Desa + Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

**2.1.2 Sistem Pelayanan Masyarakat**

Pelayanan publik atau pelayanan umum/masyarakat dapat diartikan sebagai segala bentuk atau segala jenis pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk jasa maupun barang yang bersifat publik. Sistem pelayanan publik pada dasarnya menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang semuanya mempunyai tujuan yakni untuk memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar yang ditentukan oleh pemerintahan di suatu negara kepada para birokratya. Sistem pelayanan publik pada suatu pemerintahan menjadi suatu indikator tersendiri bagi kepuasan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia agar berjalan baik, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerapkan program-program untuk mencapai perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi.

Inovasi dalam pelayanan publik sangat perlu dilakukan agar didapat hasil yakni pelayanan yang cepat efisien dan efektif. Adanya evolusi teknologi informasi, membuat laju perkembangan teknologi informasi tidak dapat dibendung lagi. Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi yang akhirnya menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi.

Pelayanan yang demikian itu dikenal dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelayanan publik dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang sering disebut sebagai pelayanan elektronik kini menjadi suatu hal yang sedang giat-giatnya dilakukan di semua lini pemerintahan di Indonesia. Karena pelayanan berbasis elektronik merupakan suatu bentuk perubahan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Agar nantinya masyarakat dapat mengakses informasi serta memperoleh jasa pelayanan publik dengan lebih baik. Dalam menentukan kebijakan apa yang sesuai agar reformasi dalam pelayanan publik dapat terealisasi dengan baik, pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui tentang bagaimana profil pengguna atau pengakses teknologi informasi di Indonesia. Agar terjadi sinergitas yang baik antara kebijakan dengan kondisi permasalahan dan kondisi masyarakat di lapangan.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui, sejauh mana masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami tentang teknologi informasi.

* 1. **Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Kurniawan Aji yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas Perusahaan kepada Pemerintah desa dan Koperasi yaitu berupa pelatihan guna meningkatkan kualitas dari masyarakat desa itu sendiri agar dapat berguana untuk kedepannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Fitri yang berjudul “Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersinergitas, tujuan yang ingin dicapai yaitu perencanaan pembangunan yang baik, sehingga dapat mengembangkan pembangunan desa Mekkala dan memiliki kemajuan dalam bidang pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas pembangunan dengan nyaman.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nailun Ni’mah yang berjudul “Keefektifan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersinergitas, tujuan yang ingin dicapai yaitu Tujuan dibentuknya program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) ini adalah untuk membuat pelayanan surat-menyurat dan administrasi pada pemerintahan desa menjadi lebih.
	1. **Kerangka Berfikir**

Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri, sinergitas justru muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama. Dalam Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.Dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 1 berikut.

Gambar 2.1. Bagan Kerangka pikir

Sistem Pelayanan Masyarakat

Sinergitas SDM Aparatur Desa

**BAB III METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran bagaimana Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kegiatan dalam penelitian ini akan mengambil data dari informan-informan yang mengetahui dengan jelastentang perencanaan pembangunan desayang ada di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, serta pihak-pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan yang valid untuk kemudian dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk kata-kata baikdalam bentuk lisan dan tulisan, agar penelitian ini dengan mudah dimengerti oleh para pembaca.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, ”Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan“. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai observe menurut W. Gulo(2012). Dalam konteks penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan menurut Cholid dan Abu(2018). Teknik wawancara dilkukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan menurut Handi Irawan(2012). Pada penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan peneliti di lapangan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian selanjutnnya. Moleang, Lexy J, (2014),mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif dalam proses pelaksanaannya terdiri dari atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan. Reduksi data dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis secara teliti dan cermat terhadap semua catatan dan data lapangan, sebab sangat mungkin terjadi bahwa tidak semua data yang diperoleh dari lapangan relevan dengan fokus penelitian sehingga data yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian harus disisihkan dari kumpulan data.

1. Penyajian Data

Setelah reduksi data yang dilakukan, kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyajikan data hasil analisis. Miles menjelaskan penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terdapat dalam ruang penelitian sekaligus merencanakan tindakan untuk mengantisipasinya.Penyajian data dapatdilakukan dalam bentuk grafik, jaringan kerja, matriks, tabel atau bentuk lainnya yang sesuai dengan data yang disajikan serta mudah dipahami.

1. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya diproses dan dianalisis sehingga menjadi data yang siap disajikan yang akhirnya menjadi kesimpulan hasil penelitian. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar, tetap terbuka skeptis dan belum jelas namun kemudian menjadi kesimpulan yang lebih rinci, mendalam dan mengakar dengan kokoh seiring dengan bertambahnya data sehingga kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil Penelitian**

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanmengenai bagaimana hubunganSinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat, yang mengatakan bahwa:“Sebenarnya hubungan Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakatsudah sangat baik,tetapi BPD yang tebentuk di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanmasih kurang memahami tugas dan fungsi BPDtermasuk dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa, sehingga mereka perlu mengikuti sosialisai yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD tersebut.”(Wawancara dengan AN,04 November 2020)

“Kami selaku anggota BPD rutin mengadakan kegiatan untuk terjun langsung ke masyarakat yang ada di setiap dusun di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanuntuk menampung masukan, saran ataupun keluhan mereka”. (Wawancara dengan DS,06 November 2020)

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sudah berjalan cukup baik yang dimana fungsi Pemerintah Desa adalah sebagai pelindung dan penasehatguna untuk mengontrol, mengatur dan mengawasi masyarakat. Selain itu juga Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama dalam mengembangkan system pelayanan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan perjanjian kerjasama yang berisi bahwa masyarakat harus selalu mengkordinasikan segala kegiatan kepada Pemerintah Desa.Adapun kerjasama yang dilakukan masyarakat terhadap Pemerintah Desa yaitu pola Kemitraan. Pola Kemitraan adalah pola kerjasama Pembangunan desa yang dimana pihak pertama akan melaksanakan Pembangunan desa diatas lahan masyarakat sekaligus melaksanakan pengelolaan Perkebunan diatas lahan tersebutsampai dengan pinjam pihak kedua kepada pihak pertama telah lunas seluruhnya, dan dilanjutkan dengan perjanjian jual beli TBS (Tandan Buah Segar) sampai dengan satu siklus tanaman (25 Tahun), dan dapat ditambahkan dengan Perjanjian Pengelolaan setelah Pinjam Biaya Pembangunan dan Pembangunan Perkebunan Lunasyang dimana ini sesuai dengan peraturan kerjasama antara Pemerintahan desa dengan masyarakat mengenai definisi poin 1.3 yaitu Pola Kemitraan.

* 1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan masyarakat, merekamembuat berbagai macam inovasi guna untuk mempermudah dan menunjang kemajuan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Salah satu inovasi menurut penulis yang menjadi unggulan di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah SAPRODI (sarana produksi).

Dikarenakan inovasi ini sangat menguntungkan dan hasilnya lumayan, sehingga pendapatan masyarakat dapat bertambah. Lalu inovasi dari pemerintahan desa berupa program penjualan TBS (tandan buah segar), dan SAPRODI (sarana produksi). Mengenai TBS juga telah di jelaskan pada Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan desa dengan masyarakat yang berisi tentang membeli TBS produksi kebun selama satu siklus (25 tahun) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintahan desa diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas buah dari hasil perkebunan buah-buahan masyarakat. Pada dasarnya intensitas adalah sebuah kebutuhan atau aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga bentuk intensitas dari uraian di atas bahwa setiap intensitas harus saling ada keterkaitan dan kordinasi serta kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan.

Intensitas Pemerintah desa kepada masyarakat yaitu berupa pelatihan guna meningkatkan kualitas dari masyarakat desa itu sendiri agar dapat berguana untuk kedepannya.Dengan adanya Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, berharap dapat memudahkan dan melancarkan pembuatan pembangunan di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Sejalan dengan itu maka untuk mengukur Sinergitas ini berjalan dengan efektif atau tidak, terdapat beberapa indikator di antaranya:

1. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergeraksebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan.Komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa itu sangat diharapkan, agar bisa terwujud pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan Kepala Desa ini,pembangunan di desaakan lebih maju.

1. Sinkronisasi

Keberhasilan dari sebuah kerjasama atau sinergitas ialah tercapainyanya tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dengan membandingkan capaian-capaian dari tahun ketahun dari target yang dicanangkan bersama. Adapun dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dilihat sudah efektif. Dikerenakan meningkatnya pembangunan di desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuandari tahun ketahun.

**BAB V KESIMPULAN**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, maka dapat disimpulkan :

1. Badan Permusyawaratan Desa harus harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dami kelangsungan pemerintah desa dan pelayanan desa. Selain itu, BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi anatara sesama anggota Badan Permuyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam setiap melaksanakan program perencanaan pembangunan.
2. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa, dengan wewenang manggali dan menghimpun masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat.
3. Kepala Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan koordinasi satu sama lain, agar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan desa tidak terhambat.
	1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, yaitu:

1. Dalam Sinergitas SDM Aparatur Desa Dalam Menyahuti Sistem Pelayanan Masyarakat Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, diharapkan seterusnya bisa berjalan dengan baik.
2. Serta ditingkatkanya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antara BPD dengan Kepala Desa dan harus terjalin harmonis agar aspirasi masyarakat yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana pembangunan desa kedepannya.
3. Kemudian kedekatan BPD dengan mayarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum paham tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri.
4. Sehingga sosialisasi terhadap masyarakat akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar terjalin pelayanan yang harmonis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Cholid dan Abu, 2018, Wawancara,Proses Tanya-Jawab Dalam Penelitian Yang Berlangsung Secara Lisan.

Deardorff dan Williams, 2016, Synergy Leadership inQuantum Organizations: Fesserdorff Consutants.

Handi Irawan, 2012, 10 prinsip Kepuasan Pelanggan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Leo Agustino, 2018, Dasar-dasar Kebijakan Publik: CV. Al fabeta Bandung.

Moleang, Lexy J, 2014,Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

W. Gulo, 2012,Observasi, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo.